BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan variabel penelitian yang menggunakan data sekunder.

4.1.1 Sejarah Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dibentuk pertamakali tanggal 14 Agustus berdasarkan penetapan Pemerintah Hindia Belanda melalui staatblad 1924 Nomor : 378 tanggal 14 Agustus 1926, pada masa pra kemerdekaan dan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membagi kembali Daerah Negara Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang salah satunya Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Jawa barat ini kemudian ditetapkan kembali oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1950. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010 bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, 520 kecamatan, 5.245 desa dan 626 kelurahan.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	
		Daratan	Garis Pantai
		(Ha)	Km *)
1	Kab. Bogor	297.646,55	0,00
2	Kab. Sukabumi	416.173,50	117,00
3	Kab. Cianjur	361.435,53	75,00
4	Kab. Bandung	172.663,29	0,00
5	Kab. Garut	311.007,54	72,00
6	Kab. Tasikmalaya	270.969,75	52,53
7	Kab. Ciamis	273.250,99	91,00
8	Kab. Kuningan	121.501,01	0,00
9	Kab. Cirebon	107.195,89	-
10	Kab. Majalengka	130.938,55	0,00
11	Kab. Sumedang	156.343,87	0,00
12	Kab. Indramayu	210.158,70	114,00
13	Kab. Subang	217.438,68	48,20
14	Kab. Purwakarta	99.400,40	0,00
15	Kab. Karawang	191.898,80	57,00
16	Kab. Bekasi	126.470,86	-
17	Kab. Bandung Barat	129.601,10	0,00
18	Kota Bogor	11.770,99	0,00
19	Kota Sukabumi	4.883,85	0,00
20	Kota Bandung	17.243,90	0,00
21	Kota Cirebon	3.899,14	-
22	Kota Bekasi	21.564,83	0,00
23	Kota Depok	20.277,21	0,00
24	Kota Cimahi	4.445,46	0,00
25	Kota Tasikmalaya	18.498,19	0,00
26	Kota Banjar	13.382,72	0,00
	Jawa Barat	**3.710.061,32**	**755,83**

Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat diolah kembali Tahun 2012 (Pemutakhiran Batas Administrasi Jawa Barat 2005 Berdasarkan Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000).

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km2 menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat dihampir seluruh Kabupaten/Kota, terkecuali Kabupaten Indramayu (Laki-laki 49,78 %, perempuan 50,22%). Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 Jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi. Kalau di jumlahkan penduduk yang tinggal di penyangga Ibu Kota dan Bandung Raya, maka didapat jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sebanyak 20.601.492 Jiwa atau 44% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jawa barat tinggal di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di table di bawah

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Kode Wil	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah Penduduk				Jumlah	%
			Laki-laki		Perempuan			
			Jumlah	%	Jumlah	%		
32.01	Kab.Bogor	1.349.533	2.573.929	51.82	2.392.692	48.18	4.966.621	11.03
32.02	Kab.Sukabumi	765.876	1.332.387	51.73	1.243.203	48.27	2.575.590	5.72
32.03	Kab.Cianjur	730.104	1.356.993	51.56	1.274.903	48.44	2.631.896	5.84
32.04	Kab.Bandung	1.067.716	1.887.541	51.39	1.785.453	48.61	3.672.994	8.16
30.05	Kab.Garut	724.388	1.381.061	51.03	1.325.525	48.97	2.706.586	6.01
32.06	Kab.Tasikmalaya	522.227	883.440	50.82	854.919	49.18	1.738.359	3.86
32.07	Kab.Ciamis	554.929	881.211	50.16	875.425	49.18	1.738.359	3.86
32.08	Kab.Kuningan	364.556	650.981	51.29	618.154	48.71	1.26.135.	2.82
32.09	Kab.Cirebon	684.433	1.234.718	51.69	1.153.844	48.31	2.388.562	5.30
32.10	Kab.Majalengka	393.030	632.952	50.90	610.487	49.10	1.243.439	2.76
32.11	Kab.Sumedang	366.947	601.037	50.76	583.150	49.24	1.184.187	2.63
32.12	Kab. Indramayu	602.558	996.448	49.78	1.005.072	50.22	2.001.520	4.44
32.13	Kab.Subang	496.003	814.535	50.31	804.553	49.69	1.619.088	3.59
32.14	Kab.Purwakarta	268.902	469.946	50.62	458.505	49.38	928.451	2.06
32.15	Kab.Karawang	680.615	1.110.874	50.72	1.079.484	49.28	2.190.358	4.86
32.16	Kab.Bekasi	592.888	1.124.246	50.82	1.088.009	49.18	2.212.255	4.91
32.17	Kab.Bandung Barat	549.289	965.002	52.05	889.157	47.95	1.854.159	4.12
32.71	Kota Bopgor	289.936	448.610	51.55	421.587	48.45	870.197	1.93
32.72	Kota Sukabumi	90.796	168.045	50.80	162.753	49.20	330.798	0.73
32.73	Kota Bandung	728.098	1.296.250	51.10	1.240.399	48.90	2.536.649	5.63
32.74	Kota Cirebon	90.698	166.194	50.41	163.475	49.59	329.669	0.73
32.75	Kota Bekasi	582.483	1.072.584	51.10	1.026.221	48.90	2.098.805	4.66
32.76	Kota Depok	482.836	913.401	50.23	869.712	48.77	1.783.113	3.96
32.77	Kota Cimahi	170.000	306.697	50.55	300.002	49.45	606.699	1.35
32.78	Kota Tasikmalaya	245.177	418.249	51.73	390.257	48.27	808506	1.80
32.79	Kota Banjar	58.064	96.862	50.21	96.041	49.79	192.903	0.43
Jumlah		**13.452.082**	**23.784.193**	**51.15**	**22.712.982**	**48.85**	**46.497.175**	

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Untuk tabel 4.2 pertumbuhan penduduk di perlukan untuk mengukur IPM (Indek Pertumbuhan Manusia) yang ada di Jawa Barat agar dapat dijadikan asset dalam pendapatan daerah dan juga sebagai tolak ukur penentuan pengeluaran daerah atau belanja daerah.

4.1.2 Gambaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Pada Pemerintahan Daerah, baik dalam hal keuangan daerah, politik anggaran, pelayanan publik, investasi pemerintah, perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan isu-isu sosial budaya, terdapat perbedaan karakteristik antara Kabupaten dan Kota diantaranya :

1. Dari aspek luas wilayah, wilayah pemerintahan daerah kabupaten relatif lebih luas daripada wilayah pemerintahan daerah kota. Oleh karenanya, di wilayah kabupaten banyak terdapat desa tertinggal, sementara untuk menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dibutuhkan anggaran yang lebih besar.
2. Dari aspek kependudukan, kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah daripada kota. Kepadatan penduduk menjadi permasalah bagi pemerintah daerah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan masalah-masalah sosial.
3. Dari aspek mata pencaharian penduduk, penduduk kabupaten umumnya bergerak di bidang pertanian atau bersifat agraris, sementara penduduk perkotaan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Dalam pembuatan kebijakan pembangunan daerah, prioritas di pemerintah daerah kabupaten akan berbeda dengan pemerintah daerah kota, khususnya dalam hal pelaksanaan urusan pilihan di daerah.

4. Dari aspek struktur pemerintahan, di wilayah kota dibentuk kecamatan dan kelurahan, sementara di wilayah kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan, dan desa atau kampung atau gampong. Kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten dan kota, yang menyatu dalam hal pembuatan kebijakan dan anggaran dengan pemerintah daerah, sementara Desa merupakan daerah otonom tersendiri di wilayah daerah kabupaten, sehingga memiliki anggaran sendiri, termasuk sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBD kabupaten.
5. Dari aspek sosial budaya, penduduk kota memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik daripada kabupaten. Fasilitas pelayanan publik juga lebih baik di kota daripada di kabupaten.
6. Dari aspek perekonomian, rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun), sehingga merupakan salah satu indikator perekonomian suatu daerah. Hal ini berimplikasi pada proporsi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan (*income*) di kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud'homme, 1995) (Syukriy,2011).

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2007 hingga tahun 2009, digunakan sebagai dasar dalam revisi RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kontribusi yang cukup siginifikan terhadap APBD Provinsi Jawa Barat, dengan rata-rata realisasi pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 14,06% per tahun selama tiga tahun terakhir (2007-2009) ini (Tabel 4.3). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori cukup mampu. Namun demikian, selama 2 tahun terakhir (2008-2009), *trend* kontribusi PAD terhadap APBD relatif stagnan yang menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PAD belum mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah.

Tabel 4.3
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2009
Provinsi Jawa Barat

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**6.008.260.131.846,00**	**7.275.007.134.689,00**	**7.787.181.567.577,00**	**14,06**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**4.221.668.696.233,00**	**5.275.051.504.266,00**	**5.520.994.690.390,00**	**14,81**
1.1.1.	Pajak daerah	3.889.839.394.944,00	4.926.338.153.202,00	4.979.386.048.300,00	13,86
1.1.2.	Retribusi daerah	30.807.390.861,00	35.398.710.486,00	38.008.734.422,00	11,14
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	122.316.435.096,00	138.674.865.159,00	179.835.133.266,00	21,53
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	178.705.475.332,00	174.639.775.419,00	323.764.774.402,00	41,56
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1.756.094.284.825,00**	**1.903.729.826.416,00**	**2.172.729.233.053,00**	**11.27**
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	822.658.284.825,00	999.370.911.216,00	1.188.431.409.053,00	20,20
1.2.2.	Dana alokasi umum	933.436.000.000,00	904.358.915.200,00	984.297.824.000,00	2,86
1.2.3.	Dana alokasi khusus	-	-	-	
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**30.497.150.788,00**	**96.225.804.007,00**	**93.457.644.134,00**	**106,32**
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)				
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	-	-	24.646.761.500,00	100,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	9.904.917.324,00	14.299.481.677,00	10.925.216.668,00	10,39
1.3.6	Lain-lain Pemerimaan	20.592.233.464,00	81.926.322.330,00	57.885.665.966,00	134,25

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

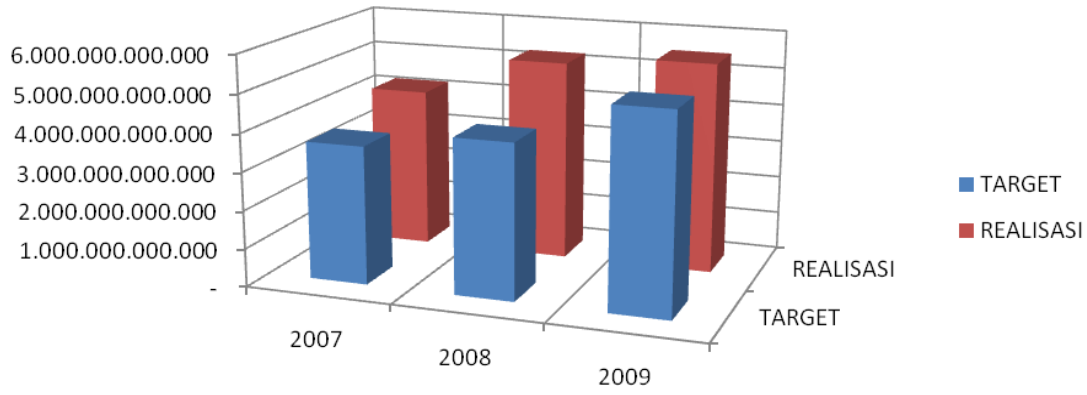
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data
***) Berlaku untuk kabupaten/kota

Pertumbuhan realisasi PAD menunjukkan disparitas tinggi yang berarti bahwa tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan, serta tingginya ketergantungan penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dimengerti karena pendapatan daerah utamanya diperoleh dari pajak kendaraan bermotor yang bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatasi oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu yang sama, menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 14,81%. Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD mencapai 116,56% sampai 130,08% (Tabel 4.4 dan Gambar 4.1). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2007–2009

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	
2007	3.621.802.762.512		4.221.668.696.233		116,56
2008	4.055.119.336.950	11,96	5.275.051.504.266	24,95	130,08
2009	5.176.292.473.000	27,65	5.520.994.690.390	4,66	106,66
2010	5.622.864.544.262	8,63			
Rata-rata Per Tahun		16,08		14,81	



Gambar 4.1

Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2007–2009

Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah,
2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah,
3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan, dan
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:
    a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
    b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
    c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
    d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
g. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
h. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
i. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2013 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Jawa Barat.
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah *(Public Private Partnership)* dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*. Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi :
    a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Jawa Barat.
    b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
    c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
    d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.

e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2008-2013 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2008-2013 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR

DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis ‘desa membangun’, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
8. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur dari 11% menjadi di bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Jawa Barat, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan

pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*).
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
    a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) pada Asian Development Bank (ADB/BUDP) dan USAID-FID berdasarkan perjanjian pinjaman

c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak
d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
g. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna

memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah

h. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Selama periode tahun 2007-2009, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 17,23%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

Tabel 4.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2009

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2007	975.397.759.531	5.708.480.402.704,00	17,09
2	Tahun Anggaran 2008	1.140.455.797.812	6.168.124.723.803,00	18,49
3	Tahun Anggaran 2009	1.358.460.638.326	8.424.318.223.908,00	16,13
	Rata-rata			17,23

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007-2009

Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya. Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu yang dibuat hingga tahun 2009, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2013 mendatang (Tabel 4.6).

Tabel 4.6
Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Pada Kurun Tahun 2011-2013

No.	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	8.424.709.887.735,00	9.207.277.276.223,00	10.143.787.320.993,00
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	700.000.000.000,00
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1.500.000.000.000,00	920.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
	Total penerimaan	9.924.709.887.735,00	10.127.277.276.223,00	11.843.787.320.993,00
	Dikurangi:			
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	4.832.067.376.818,00	5.462.483.381.010,00	6.280.591.006.994,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	5.092.644.510.917,00	4.664.793.895.213,00	4.436.807.786.001,00

Sumber : RPJMD 2008 -2013 diolah kembali Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah provinsi Jawa Barat untuk 3 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2008-2013, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2011 sebesar Rp. 5.092.644.510.917,00 atau sebesar 51 % dari total penerimaan.
2. Proyeksi Tahun 2012 sebesar Rp. 4.664.793.895.213,00 atau sebesar 46 % dari total penerimaan.

3. Proyeksi Tahun 2013 sebesar Rp. 4.436.807.786.001,00 atau sebesar 37 % dari total penerimaan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah derah dalam membiayai:

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan *(dedicated)* Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus mengecil pada tahun 2013 mendatang, sedangkan proyeksi jumlah penerimaan terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui scenario kemitraan pemerintah dan sector swasta *(public private partnership)* maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Jawa Barat;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relepan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan provinsi yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala regional dan lintas kabupaten/kota. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin akhli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.

4.2 Analisis Deskriptif

Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Guna menjawab ke empat rumusan masalah penelitian, berikut ini akan diuraikan dan dianalisis data tahunan retribusi daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2009-2010.

4.2.1 Analisis Deskriptif Data Retribusi Daerah

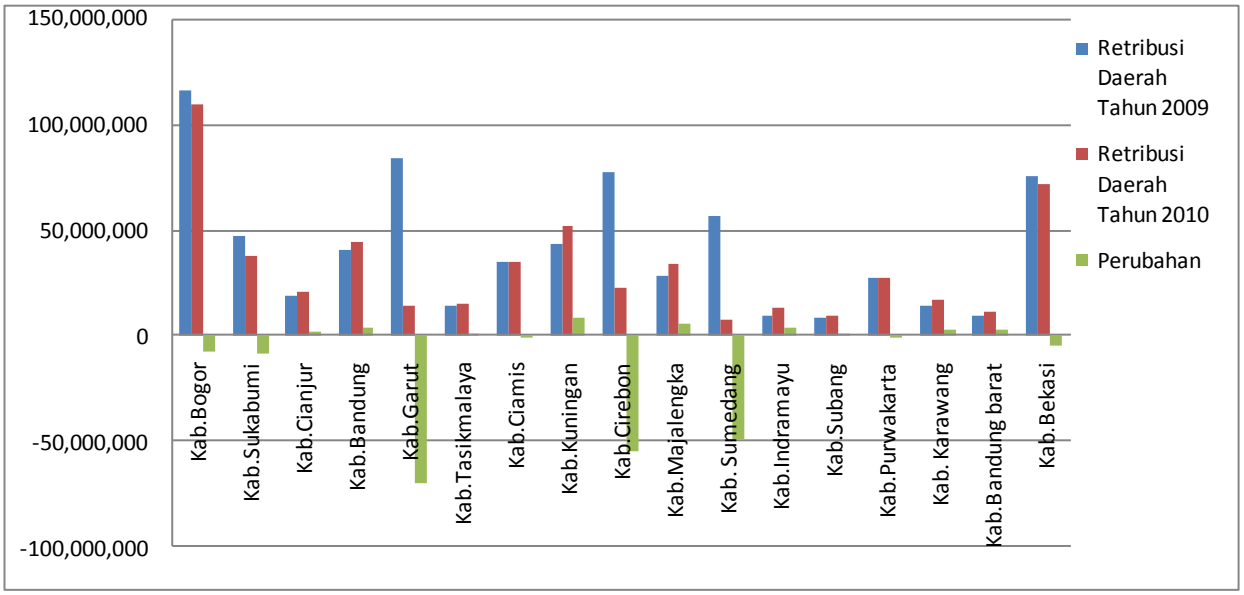
Retribusi daerah adalah sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk daerah tertentu penerimaan retribusi daerah lebih tinggi daripada pajak daerah. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Berikut gambaran data retribusi daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.7
Gambaran Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2009-2010
(dalam ribuan rupiah)

Entitas	Retribusi Daerah		
	2009	2010	Perubahan
Kab.Bogor	116,502,385	109,038,900	(7,463,485)
Kab.Sukabumi	46,766,680	38,182,682	(8,583,998)
Kab.Cianjur	18,871,003	20,365,066	1,494,063
Kab.Bandung	40,870,885	44,480,441	3,609,556
Kab.Garut	83,603,048	13,810,845	(69,792,203)
Kab.Tasikmalaya	14,216,585	14,916,203	699,618
Kab.Ciamis	35,167,494	34,776,196	(391,298)
Kab.Kuningan	43,489,127	51,528,244	8,039,117
Kab.Cirebon	77,114,207	22,610,770	(54,503,437)
Kab.Majalengka	28,769,971	34,324,898	5,554,927
Kab. Sumedang	56,704,036	7,456,551	(49,247,485)
Kab.Indramayu	9,043,680	12,807,153	3,763,473
Kab.Subang	8,483,828	9,737,065	1,253,237
Kab.Purwakarta	27,045,160	27,486,640	441,480
Kab. Karawang	13,926,361	16,916,991	2,990,630
Kab.Bandung barat	9,030,553	11,493,107	2,462,554
Kab.Bekasi	75,669,251	71,252,806	(4,416,445)
Kota Bogor	37,078,652	36,122,583	(956,069)
Kota Bandung	68,912,741	89,909,377	20,996,636
Kota Cirebon	9,406,121	11,332,707	1,926,586
Kota Bekasi	69,771,348	32,804,003	(36,967,345)
Kota Depok	34,337,346	30,778,670	(3,558,676)
Kota Cimahi	47,616,491	10,284,678	(37,331,813)
Kota Tasikmalaya	9,795,560	9,776,426	(19,134)
Kota Sukabumi	6,656,601	5,950,438	(706,163)
Kota Banjar	19,241,399	21,141,593	1,900,194

Dari table 4.7 total realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten/Kota seluruh provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 adalah Rp.1.008.090.513.000 sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp.789.285.042.000 seluruh data tersebut digunakan untuk menentukan Kabupaten dan Kota mana yang mengalami peningkatan dan penurunan retribusi daerah di Jawa Barat. untuk

mempermudah dalam memahami perubahan atau kenaikan/penurunan retribusi daerah maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

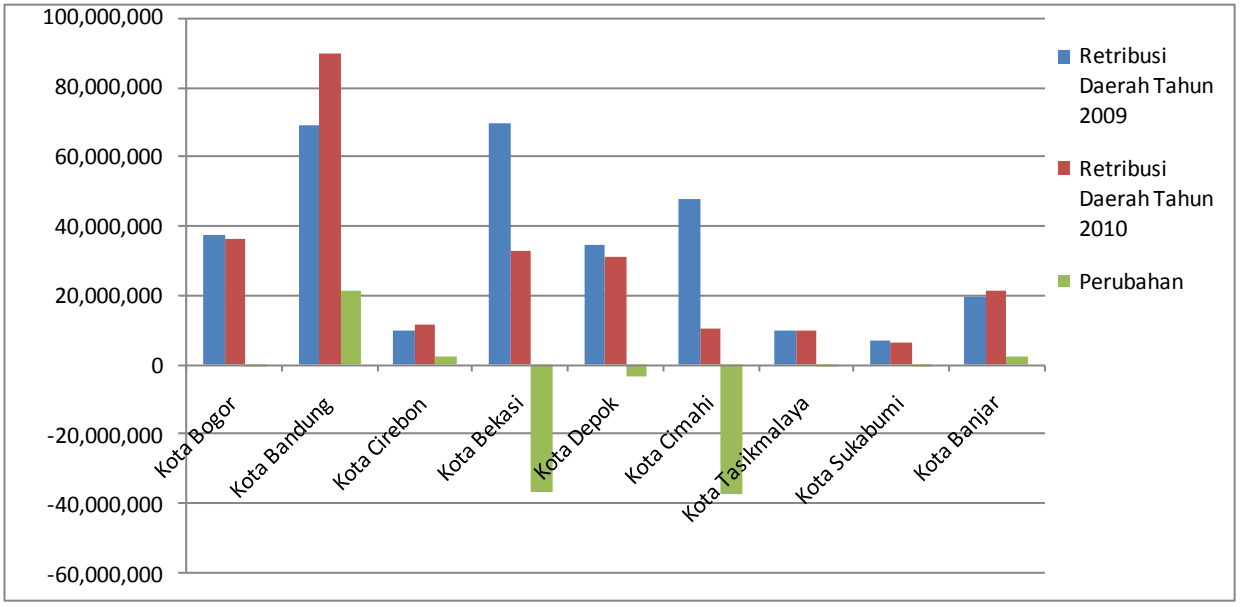


Gambar 4.2
Grafik Perubahan Retribusi Daerah Seluruh Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Dari table 4.7 dan grafik diatas terlihat bahwa di kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2010 terjadi peningkatan dan penurunan penerimaan dari retribusi daerah diantaranya penurunan terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bekasi. Namun penurunan yang sangat drastis yaitu terjadi di Kabupaten Garut penurunan tersebut mencapai Rp.69.792.203.000 atau sebesar 83,5% yang mengakibatkan penerimaan dari retribusinya rendah karena hanya menerima Rp.13.810.845.000 dibandingkan dengan tahun 2009 penerimaan

retribusinya mencapai Rp.83.603.048.000. Hal itu sesuai dengan fenomena bahwa terjadi penurunan retribusi daerah di beberapa Kabupaten di Jawa Barat.

Sementara itu peningkatan retribusi daerah di Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Barat hanya terjadi di beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bandung Barat peningkatan tersebut pun tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya (2009).



Gambar 4.3

Grafik Perubahan Retribusi Daerah Seluruh Kota Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 4.7 diatas dan grafik diatas dapat dilihat bagaimana perubahan retribusi daerah pada seluruh Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Retribusi daerah yang paling tinggi kenaikannya adalah di kota bandung, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp 20.996.636.000 atau sebesar 83,5%.

Dan yang mengalami penurunan yang sangat besar terjadi di kota Cimahi yaitu sebesar Rp.37.331.813.000 dari pendapatan retribusi sebelumnya yang mencapai Rp.47.616.491.000. Hal itu sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa terjadi penurunan Retribusi Daerah di Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi.

4.2.2 Analisis Deskriptif Data Dana Alokasi Umum

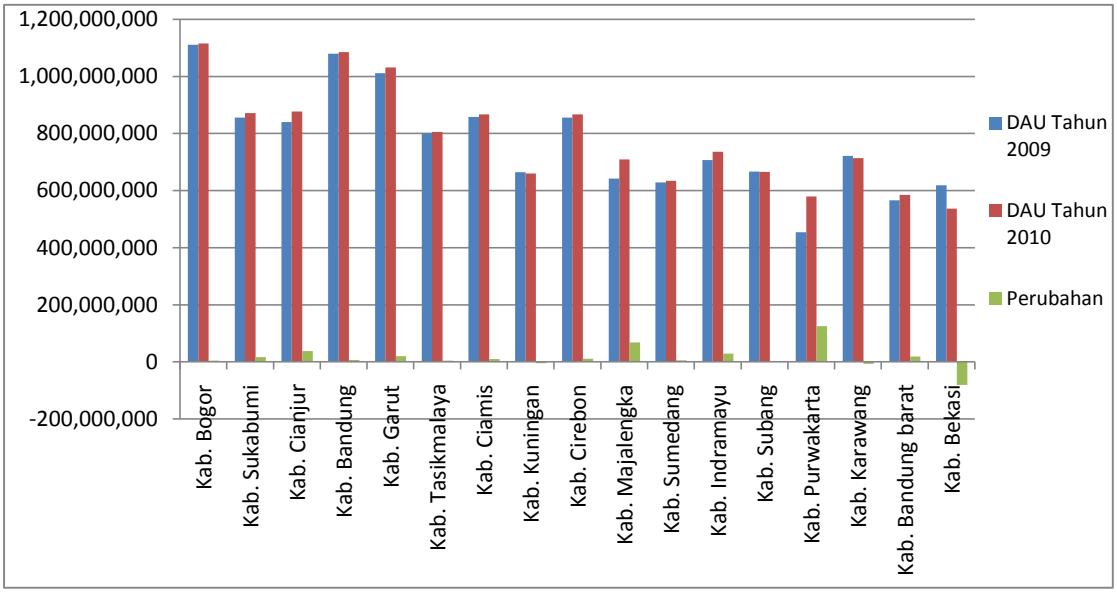
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut gambaran data dana alokasi umum untuk setiap daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.8
Gambaran Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2009-2010
(dalam ribuan rupiah)

Entitas	Dana Alokasi Umum		
	2009	2010	Perubahan
Kab. Bogor	1,111,979,562	1,115,703,641	3,724,079
Kab. Sukabumi	855,787,030	871,927,274	16,140,244
Kab. Cianjur	840,775,052	877,993,919	37,218,867
Kab. Bandung	1,080,215,507	1,086,282,210	6,066,703
Kab. Garut	1,012,043,617	1,031,869,766	19,826,149
Kab. Tasikmalaya	801,713,443	805,517,712	3,804,269
Kab. Ciamis	858,175,531	867,400,720	9,225,189
Kab. Kuningan	664,974,237	660,391,147	(4,583,090)
Kab. Cirebon	856,714,078	867,300,289	10,586,211
Kab. Majalengka	642,722,208	709,991,581	67,269,373
Kab. Sumedang	629,006,913	634,169,767	5,162,854
Kab. Indramayu	706,774,342	735,774,342	29,000,000
Kab. Subang	666,926,184	666,116,693	(809,491)
Kab. Purwakarta	454,475,242	579,513,867	125,038,625
Kab. Karawang	722,098,972	714,360,098	(7,738,874)
Kab. Bandung barat	566,578,129	584,624,959	18,046,830
Kab. Bekasi	618,237,958	536,786,256	(81,451,702)
Kota Bogor	439,246,348	426,093,607	(13,152,741)
Kota Bandung	989,233,620	912,571,834	(76,661,786)
Kota Cirebon	365,486,549	371,527,285	6,040,736
Kota Bekasi	630,392,977	647,082,121	16,689,144
Kota Depok	456,936,537	461,602,957	4,666,420
Kota Cimahi	339,000,335	333,439,320	(5,561,015)
Kota Tasikmalaya	431,419,690	426,764,264	(4,655,426)
Kota Sukabumi	287,525,695	289,801,514	2,275,819
Kota Banjar	209,610,505	217,383,597	7,773,092

Dari table 4.8 total realisasi penerimaan dana alokasi umum di Kabupaten/Kota seluruh provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 adalah Rp.17.238.050.261.000 sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp.17.431.990.713.000 seluruh data tersebut digunakan untuk menentukan Kabupaten dan Kota mana yang mengalami peningkatan dan penurunan dana alokasi

umum di Jawa Barat. untuk mempermudah dalam memahami perubahan atau kenaikan/penurunan dana alokasi umum maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

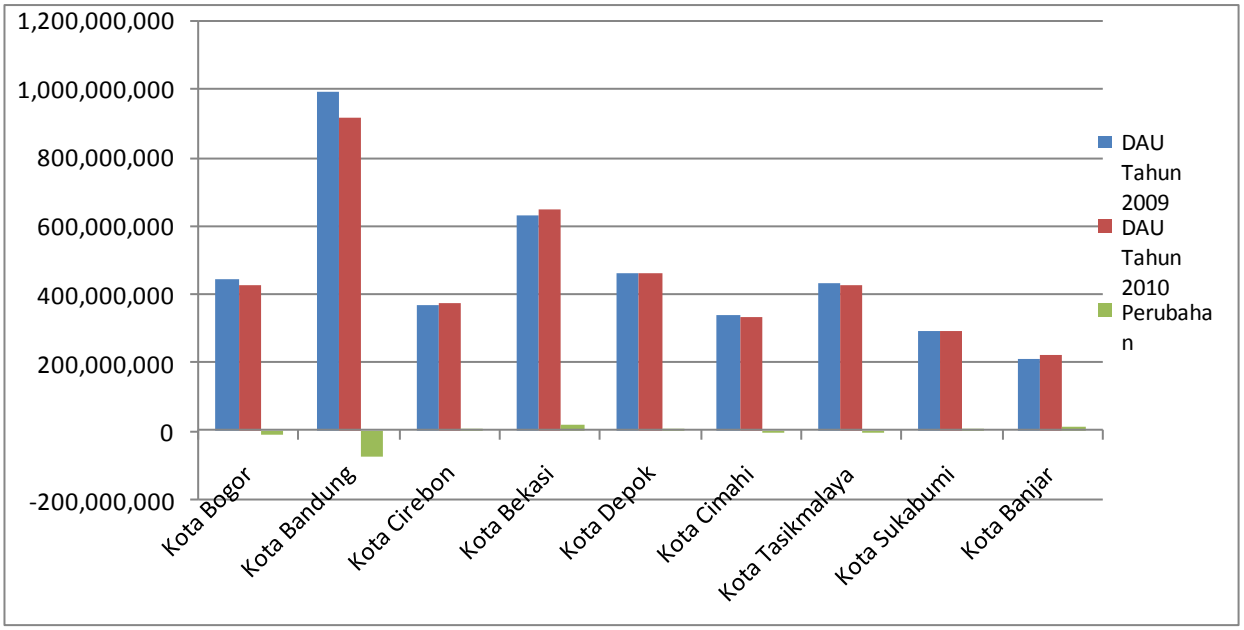


Gambar 4.4

Grafik Perubahan Dana Alokasi Umum Seluruh Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 4.8 dan grafik diatas dapat dilihat dana alokasi umum untuk masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Diharapkan dana alokasi umum menurun setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa daerah cukup mandiri untuk membiayai belanja daerahnya. Hal itu sesuai dengan pendapat Andra Eka Saputra, Ade Fatma Lubis dan Idhar Yahya (2008). Seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan. Namun dari data yang terlihat, dana alokasi umum pada

sebagian besar daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat justru mengalami kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010 diantaranya adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Majalengka. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2009-2010 bahwa terjadi fenomena Peningkatan Dana Alokasi Umum yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Majalengka.



Gambar 4.5
Grafik Perubahan Dana Alokasi Umum Seluruh Kota Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 4.8 dan grafik diatas dapat dilihat dana alokasi umum untuk masing-masing Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Penurunan yang cukup besar terjadi di Kota Bandung yaitu mencapai Rp.76.661.786.000. Namun dari data yang terlihat, dana alokasi umum pada sebagian besar daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat justru mengalami kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Hanya delapan kabupaten kota yang dana alokasi umumnya mengalami penurunan. Artinya sebagian besar kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan peningkatan kemandirian dengan diberlakukannya otonomi daerah.

4.2.3 Analisis Deskriptif Data Belanja Daerah

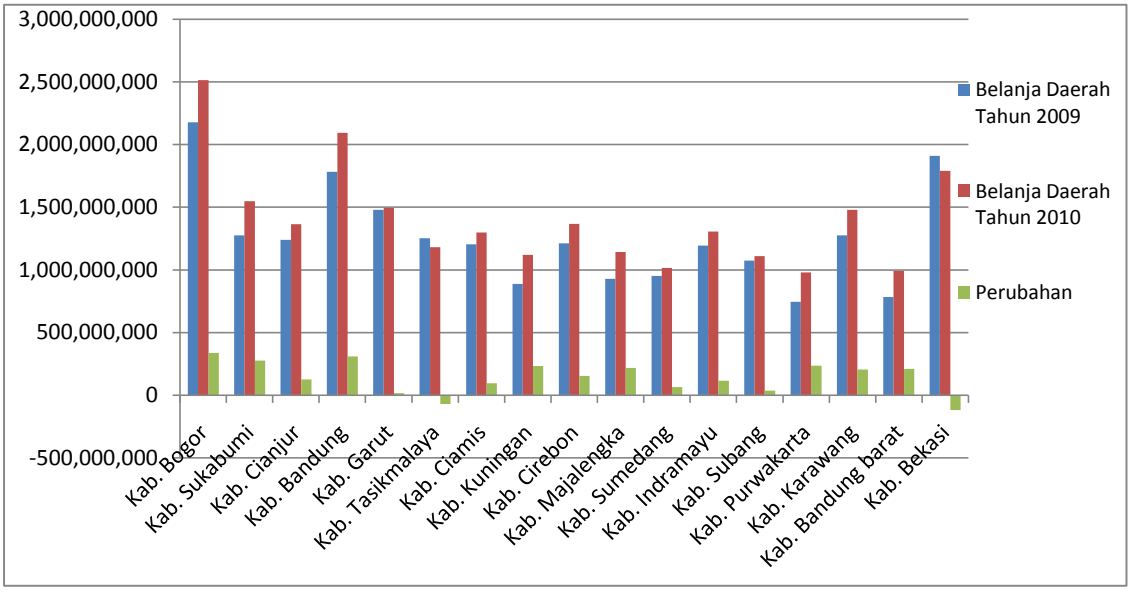
Belanja daerah merupakan beban pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang dialokasikan secara adil dan merata dalam pemberian pelayanan umum. Berikut gambaran data belanja daerah untuk setiap daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.9
Gambaran Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2009-2010
(dalam ribuan rupiah)

Entitas	Belanja Daerah		
	2009	2010	Perubahan
Kab. Bogor	2,179,663,902	2,516,354,090	336,690,188
Kab. Sukabumi	1,274,679,474	1,549,051,028	274,371,554
Kab. Cianjur	1,239,254,879	1,365,280,450	126,025,571
Kab. Bandung	1,784,086,645	2,093,853,549	309,766,904
Kab. Garut	1,478,599,869	1,493,759,225	15,159,356
Kab. Tasikmalaya	1,253,770,095	1,181,368,302	(72,401,793)
Kab. Ciamis	1,204,047,696	1,297,816,893	93,769,197
Kab. Kuningan	887,113,727	1,119,712,126	232,598,399
Kab. Cirebon	1,212,197,559	1,366,526,480	154,328,921
Kab. Majalengka	928,141,677	1,144,015,938	215,874,261
Kab. Sumedang	951,691,409	1,016,429,659	64,738,250
Kab. Indramayu	1,193,170,644	1,307,191,109	114,020,465
Kab. Subang	1,073,813,703	1,110,508,203	36,694,500
Kab. Purwakarta	745,221,563	979,822,814	234,601,251
Kab. Karawang	1,274,964,852	1,478,725,477	203,760,625
Kab. Bandung barat	782,782,450	991,421,527	208,639,077
Kab. Bekasi	1,910,725,522	1,791,205,526	(119,519,996)
Kota Bogor	776,876,996	960,407,758	183,530,762
Kota Bandung	2,240,739,995	2,461,711,591	220,971,596
Kota Cirebon	620,625,958	681,527,570	60,901,612
Kota Bekasi	1,501,555,212	1,748,528,532	246,973,320
Kota Depok	955,814,987	1,105,462,086	149,647,099
Kota Cimahi	541,071,977	614,148,269	73,076,292
Kota Tasikmalaya	687,947,281	901,584,460	213,637,179
Kota Sukabumi	557,821,518	500,384,788	(57,436,730)
Kota Banjar	395,759,400	319,154,802	(76,604,598)

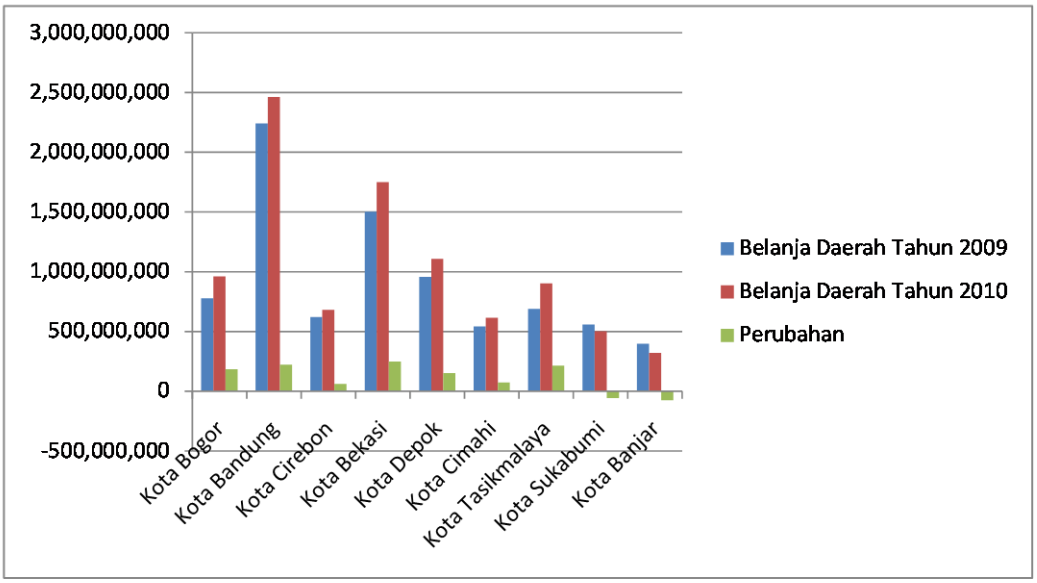
Dari table 4.9 tersebut total realisasi pengeluaran belanja daerah di Kabupaten/Kota seluruh provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 adalah Rp.29.652.138.988.000 sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp.33.122.952.852.000, untuk mempermudah dalam memahami perubahan atau

kenaikan/penurunan belanja daerah maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 4.6
Grafik Perubahan Belanja Daerah Seluruh Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Idealnya bagi daerah yang tumbuh dan membangun belanja daerah seharusnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel 4.9 dan grafik diatas dapat dilihat Belanja Daerah untuk masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebagian besar mengalami peningkatan. Namun masih ada Kabupaten yang belanja daerahnya menurun diantaranya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi.



Gambar 4.7

Grafik Perubahan Belanja Daerah Seluruh Kota Provinsi Jawa Barat

Sama halnya dengan dikabupaten di sebagian besar kota yang ada di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan Belanja Daerah dari tahun 2009 ke tahun 2010. Namun ada juga dua kota yang belanja daerahnya mengalami penurunan diantaranya terjadi penurunan belanja daerah di Kota Sukabumi dan Kota Banjar. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa telah terjadi penurunan belanja daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat diantaranya di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi dan Kota Banjar.

4.3 Analisis Verifikatif

Pada bagian ini hipotesis penelitian yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis penelitian seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya pengaruh dari variabel retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

4.3.1 Hasil Estimasi Model Regressi

Pada bagian ini akan disajikan hasil estimasi regresi pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat menggunakan regressi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi berdasarkan data tahunan selama 2 tahun pengamatan pada 26 kabupaten dan kota di Privinsi Jawa Barat. Bentuk model persamaan regressi yang akan diuji diformulasikan sebagai berikut.

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon}$$

Dimana:

Y = Belanja daerah

X_1 = Retribusi daerah

X_2 = Dana alokasi umum

b_0 = konstanta

bi = koefisien regressi variabel Xi

ε = Pengaruh faktor lain

Model regressi tersebut digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada belanja daerah yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (retribusi daerah dan dana alokasi umum). Berdasarkan hasil pengolahan data retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat di peroleh hasil regressi sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Estimasi Model Regressi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	74713783	1E+008		.739	.463
	Retribusi	6.921	1.450	.371	4.773	.000
	DAU	1.339	.164	.637	8.186	.000

a. Dependent Variable: Belanja

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.10 maka dapat dibentuk model prediksi variabel retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah sebagai berikut.

$$\mathbf{Y = 74713783 + 6{,}921\ X_1 + 1{,}339\ X_2}$$

Berdasarkan persamaan prediksi tersebut, maka dapat diinterpretasikan koefisien regressi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- Koefisien retribusi daerah sebesar 6,921 menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar satu juta rupiah diprediksi akan meningkatkan belanja

daerah sebesar 6,921 juta rupiah dengan asumsi dana alokasi umum tidak mengalami perubahan.

- Koefisien dana alokasi umum sebesar 1,339 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar satu juta rupiah diprediksi akan menaikkan belanja daerah sebesar 1,339 juta rupiah dengan asumsi retribusi daerah tidak berubah.
- Nilai konstanta sebesar 74713783 menunjukan nilai prediksi rata-rata belanja daerah apabila retribusi daerah dan dana alokasi umum sama dengan nol.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji kesahihan atau keabsahan hasil estimasi model regressi. Beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normlitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (2 tahun pengamatan).

1) Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000001
	Std. Deviation	242661437.6
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.772
Asymp. Sig. (2-tailed)		.590

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.11 dapat dilihat nilai signifikansi (*asymp.sig*.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,590. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal dan model tersebut memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,2005).

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Retribusi	.759	1.317
	DAU	.759	1.317

a. Dependent Variable: Belanja

Melalui nilai VIF yang diperoleh seperti pada tabel 4.12 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.13 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	Retribusi	Correlation Coefficient	-.148
		Sig. (2-tailed)	.294
		N	52
	DAU	Correlation Coefficient	.012
		Sig. (2-tailed)	.934
		N	52

Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.13 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini terlihat dari nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan absolut error (yaitu 0,294 dan 0,934) masih lebih besar dari 0,05.

4) Uji Asumsi Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan penggaggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan Durbin-Watson hitung terletak di daerah *No Autocorelation* (Nugroho, 2005).

Jika batas atas (du) < DW < (4 - batas bawah (dl)) maka nilai Durbin Watson berada didaerah *No Autocorelation*. Jika (4-du) < DW < (4-dl) berarti uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulanyang pasti (inconclusive).

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.

Tabel 4.14
Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi

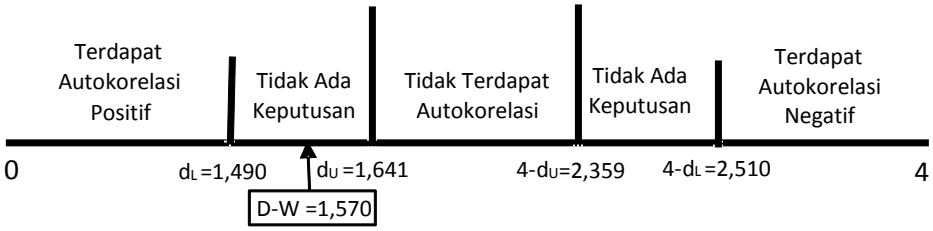
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880[a]	.775	.766	247564184	1.570

a. Predictors: (Constant), DAU, Retribusi

b. Dependent Variable: Belanja

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 1,570, sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan n = 52 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 1,490 dan batas atasnya (d_U) = 1,641. Karena nilai Durbin-Watson model regressi (1,570) berada diantara d_L (1,490) dan d_U (1,641), yaitu daerah tidak ada keputusan sehingga belum dapat disimpulkan apakah terjadi autokorelasi pada model regressi.



Gambar 4.8
Daerah Kriteria Pengujian Autokorelasi

Untuk memastikan ada tidaknya autokorelasi maka pengujian dilanjutkan menggunakan *runs test* (Gujarati,2009). Hasil pengujian menggunakan *runs test* dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15
Hasil Runs Test Untuk Memastikan Ada Tidaknya Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-6071149.866
Cases < Test Value	26
Cases >= Test Value	26
Total Cases	52
Number of Runs	23
Z	-1.120
Asymp. Sig. (2-tailed)	.263

a. Median

Melalui hasil *runs test* pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji Z (yaitu 0,263) masih lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat autokkorelasi pada model regressi. Karena keempat asumsi regressi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regressi sudah memenuhi syarat BLUE (*best linear unbias estimation*) sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

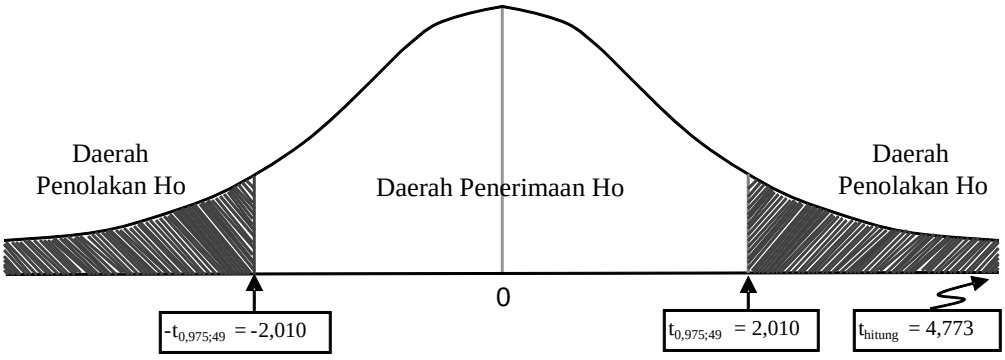
4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Diduga retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$Ho_1.\beta_1 = 0$: Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat

$Ha_1.\beta_1 \neq 0$: Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.10 diperoleh nilai t_{hitung} variabel retribusi daerah sebesar 4,773 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,010 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 49 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (4,773) lebih besar dari t_{tabel} (2,010) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_1 sehingga Ha_1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 4.9

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

(Pengaruh Retribusi daerah)

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap belanja daerah dihitung korelasi perasial. Koefisien korelasi parsial antara retribusi daerah dengan belanja daerah ketika dana alokasi umum tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16
Koefisien Korelasi Parsial Retribusi daerah Dengan Belanja daerah

Correlations

Control Variables			Belanja	Retribusi
DAU	Belanja	Correlation	1.000	.563
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	49
	Retribusi	Correlation	.563	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	49	0

Koefisien korelasi parsial antara retribusi daerah dengan belanja daerah ketika dana alokasi umum tidak berubah adalah sebesar 0,563 dengan arah positif. Artinya retribusi daerah memiliki hubungan yang cukup kuat/cukup erat dengan belanja daerah ketika dana alokasi umum tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa ketika retribusi daerah meningkat, sementara dana alokasi umum tidak berubah maka belanja daerah juga akan naik. Kemudian besar pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah ketika dana alokasi umum tidak berubah adalah $(0{,}563)^2 \times 100\% = 31{,}7\%$. Artinya retribusi daerah memberikan

pengaruh sebesar 31,7% terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Dengan melihat hasil pengujian hipotesis diatas yang menyatakan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Sebaiknya melakukan langkah-langkah yang konkrit dan signifikan dalam usaha peningkatan retribusi daerah serta pemungukan terhadap retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih intensif dan aktif. Dengan meningkatnya penerimaan retribusi daerah, PAD juga akan meningkat dikarenakan retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah.

Hal ini perlu dilakuakan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat karena seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan sumber utama bagi pendapatan daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Devas et.al, (1989) bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dan hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintah daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Lebih lanjut bahwa rasio retribusi daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 31,7%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal sumbangan terhadap PAD penerimaan dari retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup

besar. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan retribusi daerah merupakan sektor andalan bagi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dalam hal peningkatan penerimaan retribusi daerah antara lain:

1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam professional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerima pelayanan, hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa pemungutan retribusi daerah berkaitan erat dengan pelayanan publik yang diberikan.
2. Perlu dikembangkan suatu konsep kebijakan publik yang dapat memperluas dan meningkatkan obyek dan subyek penerimaan retribusi daerah terutama dari sektor-sektor publik yang dinilai potensial.
3. Melakukan penelitian yang intensif dan akurat terhadap potensi rill sumber-sumber penerimaan retribusi daerah yang sejalan dengan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada.

Hasil penelitian ini konsisten mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Andra eka saputra, Ade Fatma Lubis dan Idhar Yahya (2008). yang menyatakan bahwa retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap total belanja daerah.

4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

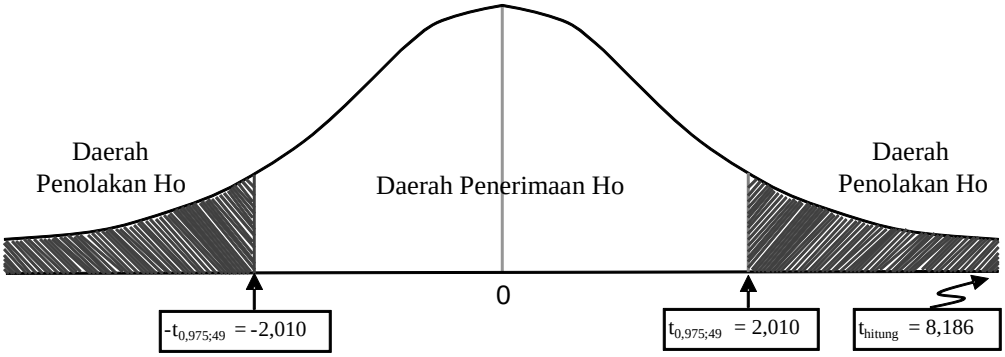
Diduga dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, karena itu peneliti menetapkan hipotesis

penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_2. $\beta_2 = 0$: Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat

Ha_2. $\beta_2 \neq 0$: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.10 diperoleh nilai t_{hitung} variabel dana alokasi umum sebesar 8,186 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,010 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 49 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (8,186) lebih besar dari t_{tabel} (2,010) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_2 sehingga Ha_2 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hal itu konsisiten dengan hasil penelitiannya Kesit Bambang Prakosa (2004).



Gambar 4.10
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial
(Pengaruh Dana alokasi umum)

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja daerah dihitung korelasi perasial. Koefisien korelasi antara dana alokasi umum dengan belanja daerah ketika retribusi daerah tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Koefisien Korelasi Parsial Dana alokasi umum Dengan Belanja daerah

Correlations

Control Variables			Belanja	DAU
Retribusi	Belanja	Correlation	1.000	.760
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	49
	DAU	Correlation	.760	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	49	0

Hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja daerah ketika retribusi daerah tidak berubah adalah sebesar 0,760 dengan arah positif. Artinya dana alokasi umum memiliki hubungan yang kuat/ erat dengan belanja daerah ketika retribusi daerah tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa ketika dana alokasi umum meningkat, sementara retribusi daerah tidak berubah maka belanja daerah akan meningkat. Kemudian besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah ketika retribusi daerah tidak berubah adalah $(0,760)^2 \times 100\% = 57,8\%$. Artinya dana alokasi umum memberikan pengaruh sebesar 57,8% terhadap retribusi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Dengan melihat hasil pengujian hipotesis diatas yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah di pengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Jika hal ini masih berlangsung terus maka otonomi daerah kemungkinan besar akan terhambat. Maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali potensi PAD menjadi sangat penting.

Disisi lain efektifitas Belanja Daerah juga perlu menjadi perhatian, karena bukan rahasia umum lagi setiap akhir tahun anggaran terjadi penghabisan anggaran belanja hal ini menunjukan bahwa Pemda menunggu beberapa alokasi DAU yang

diperolehnya sebelum menentukan berapa belanja yang akan dihabiskannya, seperti yang telah di ungkapkan oleh Simanjuntak (dalam Sidik et al, 2002).

Dalam penelitian ini Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja daerah dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, dana alokasi umum memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah dibanding retribusi daerah. Yaitu berpengaruh sebesar 57,8% pengaruh dari DAU terhadap Belanja Daerah.

4.3.4 Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Selanjutnya untuk membuktikan apakah retribusi daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, dilakukan pengujian secara bersama-sama dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_3 : Semua $\beta i = 0$ $i = 1,2$	Retribusi daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat
Ha_3 : Ada $\beta i \neq 0$ $i = 1,2$	Retribusi daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tertera pada tabel 4.18 di bawah ini:

Tabel 4.18

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama

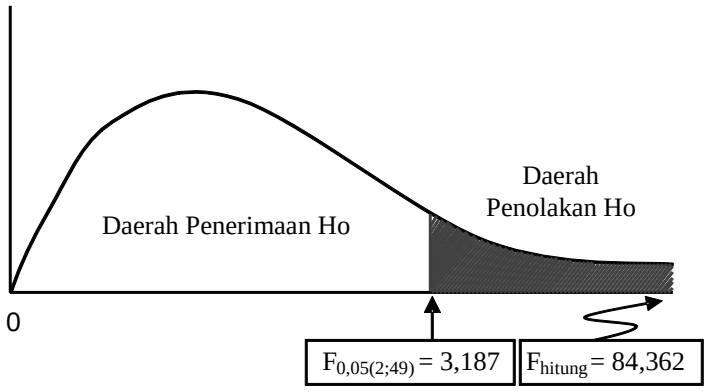
ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.0E+019	2	5.170E+018	84.362	.000[a]
	Residual	3.0E+018	49	6.129E+016		
	Total	1.3E+019	51			

a. Predictors: (Constant), DAU, Retribusi

b. Dependent Variable: Belanja

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 84,362 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2;49) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,187. Karena F_{hitung} (84,362) lebih besar dari F_{tabel} (3,187) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menolak Ho_3 sehingga Ha_3 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 4.11

Grafik Daerah penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel independen (retribusi daerah dan dana alokasi umum) secara bersama-sama dengan variabel belanja daerah dihitung koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi retribusi daerah dan dana alokasi umum secara simultan dengan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19

Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880[a]	.775	.766	247564184	1.570

a. Predictors: (Constant), DAU, Retribusi

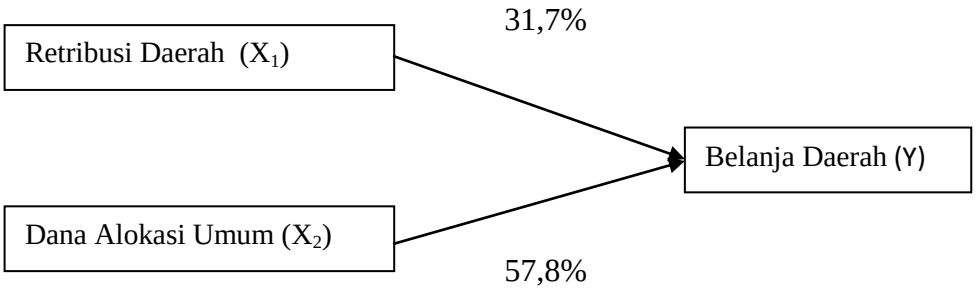
b. Dependent Variable: Belanja

Nilai R pada tabel 4.19 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel bebas (retribusi daerah dan dana alokasi umum) secara simultan dengan belanja daerah. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (retribusi daerah dan dana alokasi umum) memiliki hubungan yang sangat kuat/sangat erat dengan belanja daerah. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,880 berada diantara 0,80 hingga 1,00 yang termasuk dalan kriteria korelasi yang sangat kuat.

Selain korelasi berganda juga dihitung koefisien determinasi, yaitu suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,775 yaitu nilai R-Square pada tabel 4.19. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari retribusi daerah dan dana alokasi umum secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada belanja daerah sebesar 77,5 persen. Dengan kata lain secara bersama-sama kedua variabel bebas (retribusi daerah dan dana alokasi umum) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 77,5% terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 22,5%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar retribusi daerah dan dana alokasi umum. Faktorlain diantaranya dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan dana alokasi khusus.

Dalam penelitian ini Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, dana alokasi umum memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah yaitu 57,8% dibanding retribusi daerah yang hanya berpengaruh 31,7%.



Gambar 4.12
Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Pengujian atas pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variable tersebut berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan mana yang lebih dominan. Hasil yang didapat adalah pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah. Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, Seperti Aaberge & Langorgen (1997), Anderson (2002), Deller et al (2002) Sukriy dan Halim (2004).